

**STRATEGI PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DALAM  
MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI  
PEMERINTAH DAERAH**

**Doni Heri Afriansyah<sup>1</sup>, Muslimin Ritonga<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: [doniheriafriansyah033@gmail.com](mailto:doniheriafriansyah033@gmail.com)<sup>1</sup>, [musliminritonga@radenfatah.ac.id](mailto:musliminritonga@radenfatah.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Strategi protokol dan komunikasi pimpinan berperan penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, serta analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi dilakukan melalui pengelolaan agenda pimpinan, koordinasi antarperangkat daerah, serta pemanfaatan media digital dan media massa untuk meningkatkan transparansi pemerintahan. Namun, pelaksanaannya masih terkendala koordinasi internal yang belum optimal, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan optimalisasi media komunikasi agar keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif.

**Kata Kunci** — Strategi Komunikasi, Protokol, Komunikasi Pimpinan, Informasi Publik, Pemerintah Daerah.

**Abstract**

*The protocol and communication strategies of leaders play a crucial role in realizing public information transparency in local government. This study aims to analyze the strategies of the Protocol and Communication Section of the Regional Secretariat of Lahat Regency in managing and conveying public information. The study employed a descriptive qualitative approach with observation, interviews, documentation, and literature studies, as well as data analysis using the Miles and Huberman model. The results indicate that the communication strategy is implemented through managing the leadership agenda, coordinating between regional agencies, and utilizing digital and mass media to increase government transparency. However, its implementation is still hampered by suboptimal internal coordination, so that coordination is needed to strengthen coordination and optimize communication media so that public information transparency can run more effectively.*

**Keywords**— *Communication Strategy; Protocol; Leadership Communication; Public Information; Local Government.*

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi menjadi sarana penting bagi

masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola dan menyampaikan informasi publik secara jelas, akurat, dan tepat waktu.

Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam struktur Sekretariat Daerah, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memegang peran penting dalam mengatur agenda pimpinan, melaksanakan fungsi keprotokolan, serta mengelola komunikasi dan informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah. Bagian ini menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus berperan dalam membangun citra dan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Di era digital, arus informasi berkembang sangat cepat dan masyarakat semakin kritis terhadap informasi yang diterima. Kondisi ini menuntut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk tidak hanya menjalankan fungsi keprotokolan secara administratif, tetapi juga mampu merancang strategi komunikasi yang efektif. Pemanfaatan media digital, media sosial, serta kerja sama dengan media massa menjadi kebutuhan utama dalam menyampaikan informasi publik agar dapat menjangkau masyarakat secara luas dan merata. Strategi komunikasi yang tepat akan berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan informasi publik oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala koordinasi internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya kerja sama antarperangkat daerah dapat memengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Apabila strategi komunikasi tidak dijalankan secara terencana dan terkoordinasi dengan baik, maka informasi yang disampaikan berpotensi tidak tersampaikan secara utuh atau menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dalam mengelola dan menyampaikan informasi publik, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan strategi komunikasi pemerintahan daerah yang lebih efektif dan transparan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap proses, strategi, serta praktik komunikasi yang dijalankan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

### **Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Penelitian ini memfokuskan kajian pada peran dan strategi yang dijalankan oleh bagian tersebut dalam mengelola serta menyampaikan

informasi publik yang berkaitan dengan kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah.

Objek penelitian mencakup proses pengelolaan agenda pimpinan, pola koordinasi internal dengan perangkat daerah, pemanfaatan media komunikasi, serta mekanisme penyampaian informasi publik kepada masyarakat. Melalui pengamatan terhadap objek tersebut, penelitian ini berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena keberhasilan penelitian sangat bergantung pada data yang diperoleh. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (Wulansari et al., n.d.).

#### **1. Observasi**

Observasi dilakukan secara langsung di Lokasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat. Melalui observasi ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek, situasi, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Melalui observasi, peneliti dapat melihat sendiri bagaimana suatu aktivitas dilakukan, bagaimana perilaku orang-orang yang terlibat, serta bagaimana proses kerja terjadi di lapangan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan terstruktur atau tidak terstruktur antara pewawancara dan narasumber (orang yang diwawancarai) untuk mendapatkan informasi, data, atau pandangan secara langsung tentang suatu topik, yang bisa dilakukan untuk berbagai tujuan seperti rekrutmen kerja, penelitian, jurnalisme, atau sekadar mencari tahu sesuatu. Proses ini melibatkan tanya jawab yang bertujuan menggali informasi mendalam, baik secara lisan maupun terekam.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

#### **4. Studi Pustaka**

Peneliti juga melakukan studi pustaka dengan mengkaji literatur, jurnal ilmiah, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Sekretariat Daerah, Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Studi pustaka ini digunakan untuk memperkuat landasan teori dan memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

Melalui penerapan keempat teknik pengumpulan data tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Observasi dan wawancara memungkinkan peneliti melihat serta mendengar secara langsung bagaimana proses komunikasi dijalankan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga kondisi yang terjadi di lapangan dapat dipahami secara nyata. Data yang diperoleh dari kedua teknik ini memberikan gambaran faktual mengenai praktik komunikasi yang berlangsung.

Sementara itu, dokumentasi dan studi pustaka berperan sebagai pendukung dalam memperdalam analisis penelitian. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan menjadi bukti tertulis dan visual atas kegiatan yang diamati, sedangkan studi pustaka memberikan landasan teori yang relevan untuk menafsirkan temuan di lapangan. Dengan menggabungkan data lapangan dan kajian pustaka, analisis yang dihasilkan menjadi lebih

kuat, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan demikian, hasil dari teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lahat berperan efektif sebagai sarana mengelola informasi publik.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka secara mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk memahami strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Lahat.

Proses analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu proses penafsiran data untuk memperoleh gambaran mengenai pola, makna, serta temuan penelitian yang berkaitan dengan strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam pengelolaan informasi publik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Strategi Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik**

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis. Dalam konteks ini, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang mendukung transparansi pemerintahan. Strategi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian arus informasi publik.

Strategi awal yang diterapkan adalah pengelolaan agenda pimpinan secara terstruktur dan sistematis. Setiap kegiatan pimpinan daerah direncanakan dan dijadwalkan dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga memungkinkan proses dokumentasi dan publikasi dilakukan secara optimal. Pengelolaan agenda yang baik menjadi fondasi utama dalam penyusunan informasi publik yang akan disampaikan kepada masyarakat.

Selain pengelolaan agenda, strategi komunikasi juga dilakukan melalui perencanaan pesan yang disesuaikan dengan kebutuhan publik. Informasi yang disampaikan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memuat substansi kebijakan dan program pemerintah daerah. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui aktivitas pimpinan, tetapi juga memahami arah dan tujuan kebijakan yang diambil.

Koordinasi lintas perangkat daerah merupakan bagian penting dari strategi protokol dan komunikasi pimpinan. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menjalin koordinasi dengan dinas dan instansi terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan bersifat akurat, konsisten, dan tidak bertentangan dengan kebijakan resmi pemerintah daerah. Koordinasi ini menjadi kunci dalam menjaga kredibilitas informasi publik.

Pemanfaatan media digital menjadi strategi yang semakin relevan di era perkembangan teknologi informasi. Media sosial resmi pemerintah daerah, situs web, serta platform digital lainnya digunakan sebagai sarana utama dalam menyebarluaskan

informasi publik. Strategi ini memungkinkan informasi dapat diakses secara cepat dan luas oleh masyarakat, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Selain media digital, kerja sama dengan media massa juga menjadi bagian dari strategi komunikasi pimpinan. Media massa berperan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih luas dan berimbang. Melalui kerja sama ini, informasi pemerintah daerah dapat dikemas secara profesional dan memiliki daya jangkau yang lebih besar.

Secara keseluruhan, strategi protokol dan komunikasi pimpinan yang diterapkan telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Kabupaten Lahat. Meskipun demikian, strategi tersebut perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat agar keterbukaan informasi publik dapat terwujud secara berkelanjutan.

### **B. Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Pengelolaan dan Penyampaian Informasi Publik**

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat. Peran ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan keprotokolan, tetapi juga mencakup fungsi komunikasi publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Dengan peran tersebut, bagian ini menjadi garda terdepan dalam membangun hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam pengelolaan informasi publik, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan bertanggung jawab terhadap proses pendokumentasian kegiatan pimpinan daerah. Dokumentasi berupa foto, video, dan laporan kegiatan menjadi sumber utama informasi yang akan dipublikasikan. Pengelolaan dokumentasi yang baik akan mendukung penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain dokumentasi, peran lainnya adalah menyusun dan mengemas informasi publik agar mudah dipahami oleh masyarakat. Informasi yang bersifat administratif dan teknis disederhanakan tanpa mengurangi substansi, sehingga dapat diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Proses pengemasan informasi ini menjadi penting agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan penafsiran yang keliru.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga berperan sebagai penghubung antara pimpinan daerah dan media. Hubungan yang baik dengan media massa memungkinkan informasi pemerintah daerah dapat disampaikan secara objektif dan tepat sasaran. Peran ini sekaligus mendukung pembentukan citra positif pemerintah daerah di mata publik.

Dalam konteks internal, bagian ini berperan dalam membangun komunikasi yang harmonis antara pimpinan dan perangkat daerah. Komunikasi internal yang efektif akan berdampak pada kelancaran penyampaian informasi publik, karena setiap unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.

Peran strategis lainnya adalah memastikan informasi publik yang disampaikan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi, yaitu akurat, tepat waktu, dan tidak diskriminatif. Dengan menjalankan peran ini, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan turut mendukung pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat daerah.

Dengan demikian, peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Peran ini perlu terus diperkuat agar pengelolaan informasi publik dapat berjalan secara optimal.

### **C. Kendala dalam Penerapan Strategi Protokol dan Komunikasi Pimpinan**

Meskipun strategi protokol dan komunikasi pimpinan telah diterapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas keterbukaan informasi publik. Kendala tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kendala tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya koordinasi internal antarpegawai dan antarbagian. Kurangnya komunikasi yang intensif dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi atau ketidaksesuaian data yang dipublikasikan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas informasi publik yang diterima masyarakat.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam penerapan strategi komunikasi. Tidak semua pegawai memiliki kompetensi yang memadai di bidang komunikasi publik dan pengelolaan media digital. Akibatnya, beban kerja sering kali tidak seimbang dengan kemampuan personel yang tersedia.

Selain sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan. Peralatan dokumentasi dan teknologi informasi yang belum memadai dapat menghambat proses pengelolaan dan penyebaran informasi publik. Hal ini berdampak pada kualitas dan kecepatan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Tingginya intensitas kegiatan pimpinan daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Padatnya agenda pimpinan menuntut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan untuk bekerja secara cepat dan tepat, sementara keterbatasan waktu sering kali menjadi kendala dalam proses koordinasi dan publikasi informasi.

Selain itu, dinamika perkembangan media dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi informasi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Masyarakat kini lebih kritis dan cepat merespons informasi, sehingga kesalahan kecil dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan persepsi negatif.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi internal, serta pengembangan sarana dan prasarana komunikasi. Dengan demikian, strategi protokol dan komunikasi pimpinan dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Lahat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi protokol dan komunikasi pimpinan yang diterapkan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat memiliki peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di pemerintahan daerah. Strategi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan agenda pimpinan yang terencana, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemanfaatan media komunikasi, baik media digital maupun kerja sama dengan media massa, sehingga informasi mengenai kegiatan dan kebijakan pimpinan daerah dapat diakses oleh masyarakat secara lebih terbuka.

Selain strategi yang diterapkan, peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga terlihat dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik secara sistematis dan terkoordinasi. Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui pendokumentasian kegiatan, penyusunan materi publikasi, serta penyampaian informasi yang akurat dan mudah dipahami. Peran tersebut berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap

kinerja Pemerintah Kabupaten Lahat.

Namun demikian, pelaksanaan strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait koordinasi internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi antarpegawai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan media komunikasi agar strategi yang diterapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal antarpegawai serta antarperangkat daerah guna memastikan penyampaian informasi publik berjalan lebih efektif dan konsisten.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di bidang komunikasi publik dan pengelolaan media digital perlu dilakukan secara berkelanjutan, disertai dengan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat strategi protokol dan komunikasi pimpinan dalam mendukung keterbukaan informasi publik serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Fahlevvi, M. R., & Muslim, T. A. (2025). Analisis Peran Protokol Kepemimpinan dalam Pengelolaan Administrasi, Dokumentasi, dan Publikasi di Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Kantor Wali Kota Pontianak. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(3), 41-50. <https://doi.org/10.9963/f3s59g53>
- Hasanuddin, F. F. S., Amir, A. S., & Arya, N. (2023). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Situs Web Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan. *Perspektif: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6(2), 209–218. <https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218>
- Heranita, F., & Akhmad, J. (2024). Peran Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Manajemen Akuntansi Indonesia*, (873).
- Hidayatullah, M., Ardiansah Putra, M. R., & Jumaddil. (2022). Peranan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam Meningkatkan Citra. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 8(1). <https://doi.org/10.36914/jwngn787>.
- Indah, T., & Hariyanti, P. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(2). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol12.iss2.art3>
- Jaya, I. G. P. (2025). Efektivitas Publikasi Kegiatan Pemerintah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13284>.
- Oktaviani, W., & Fitri Helmi, R. (2025). Diseminasi Informasi Publik: Pendukung dan Penghambat Peningkatan Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Pasaman. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 10. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2702>.
- Sangkop, P. R., Pati, A. B., & Egeten, M. M. (2025). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 12(3). <https://doi.org/10.35797/jp.v12i3.50241>.

Tumanggor, T., & Kholil, S. (2025). Reformasi Sistem Komunikasi Organisasi Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(2), 1381-1391. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1427>.